

**PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PENGEMBANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN SINJAI**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu
Perpustakaan (S1) jurusan ilmu perpustakaan
Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

**SUARDI JUFRI
NIM. 40400112045**

**JURUSAN ILMU PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan pada diriku, meski semua itu belum menjadi kenyataan yang bisa kuraih ‘insyaAllah atas dukungan, Doa dan Restu semua mimpi itu akan terjawab dimasa penuh kehangatan yang akan datang. Untuk itu kupersembahkan ungkapan terima kasihku kepada:

Untuk Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang telah memberiku kasih sayang, dukungan yang tidak terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan sebuah karya kecil dan untaian kata-kata yang kupersembahkan. Semoga ini menjadi langkah awal bagiku untuk membuat Ayah dan Ibunda tercinta bahagia karena saya sadar selama ini belum bisa berbuat lebih.

Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan tuhan dan orang lain, tidak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama keluarga, dan para sahabat-sahabat terbaik. Kupersembahkan kepada kalian semua terima kasih yang setinggi-tingginya kuucapkan atas segala kekhilafan dan kekuranganku kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta kata maaf beribu-ribu tercurah.

Terima Kasih Ayah.....Terima Kasih Ibu.....

“life is a struggle”

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suardi Jufri
NIM : 40400112045
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 05 Februari 1995
Jurusan : Ilmu Perpustakaan
Alamat : Dusun Annie, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan,
Kabupaten Sinjai
Judul : Peran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Romang Polong, 25 Januari 2019

Penyusun,

SUARDI JUFRI
NIM.40400112045

PENGESAHAN SKRIPSI

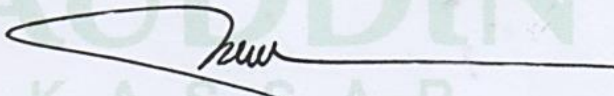
Skripsi yang berjudul: Peran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai, yang disusun oleh Suardi Jufri, Nim: 40400112045, Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Ilmu Perpustakaan (dengan beberapa perbaikan).

Romang polong, 25 Januari 2019

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Drs. Abd. Rahman R, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Touku Umar, S.Hum., M.I.P	(.....)
Munaqisy I	: Irvan Mulyadi, S.Ag., S.S., M.A	(.....)
Munaqisy II	: Dra. Hj. Surayah, M.P.d	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. M. Dahlan M, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Drs. M. Jayadi, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar,


Dr. H. Barsihannor, M.Ag
NIP: 19691012 199603 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada *rahmatan lil 'alamin* Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cerminan peradaban terhebat sepanjang sejarah.

Skripsi yang berjudul “Peran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Perpustakaan, Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Dalam rangka menyusun skripsi ini, penulis banyak memiliki banyak hambatan, tetapi *alhamdulillah* berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moral maupun materil, semua kesulitan dapat teratasi. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang teristimewa kedua orang tua tercinta Ayahanda Jufri, dan ibunda Kati, kami haturkan ucapan terima kasih yang tulus, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta pengorbanan mengasuh, membimbing dan mendidik disertai doa yang tulus tiada hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perguruan tinggi ini, semoga jasa-jasanya dibalas oleh Allah SWT. Serta kakak dan adik-adikku

tercinta dan seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi penulis menuntut ilmu di kampus dalam melaksanakan study S1.

Penulis juga menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil Rektor dan seluruh staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Barsihannor, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, beserta para wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora.
3. A. Ibrahim, S. Ag, S.S., M. Pd, selaku Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan, dan Himayah, S. Ag, S.S.,MIMS, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora.
4. Dr. H. M. Dahlan, M. Ag, selaku konsultan I dan Drs. M. Jayadi. M. Ag, selaku konsultan II yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan, mulai dari judul hingga selesainya skripsi ini.
5. Dra. Sorayah Rasyid, M. Pd, selaku munaqisy I dan Irvan Muliyadi S. Ag., S.S., M. A, selaku munaqisy II yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan, mulai dari judul hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Para Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar beserta Staf Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu, mengarahkan penulis hingga taraf penyelesaian.
7. Kepala Perpustakaan dan segenap staf perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar yang telah menyiapkan referensi dan memberikan kemudahan untuk dapat dapat memanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian skripsi ini.
8. Para Staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proses administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Bapak La Baba Faisal, SH. M.Pd, beserta jajarannya yang telah memberi izin penelitian dan memberi masukan kepada penulis sekaligus menjadi informan pada penelitian yang dilakukan penulis.
10. Dan untuk Jumatika, Amd. Ak yang tiada hentinya selalu memberikan dukungan, motivasi dan bantuan terima kasih atas semangat yang diberikan kepada penulis selama proses sampai terselesaikannya skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora terkhusus Jurusan Ilmu Perpustakaan angkatan 2012 Ap 1 dan 2 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menyelesaikan program studynya lebih awal semoga kalian semua sukses dan adik-adik di Jurusan Ilmu Perpustakaan terima kasih atas doa dan dukungannya.

12. Teman- teman seperjuangan dari DPP Lingkar Mahasiswa Sulawesi Selatan yang sudah seperti saudara sendiri kak Iwan, kak Adi, kak Ikhsan, kak Andi, kak Yayat, Ade Rahman, Anhys dan teman-teman lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu semoga pertemanan kita membawa berkah, seperti dalam sebuah hadist “Tiada naungan dihari kiamat kecuali pada 7 golongan orang dan salah satunya adalah para pemuda yang berteman karena Allah SWT”.
13. Teman –teman KKN Bontosomba Kabupaten Maros dan masyarakat serta adik-adik yang ada di dusun Bara yang telah menganggap penulis sebagai keluarga sendiri dan senantiasa memberi spirit kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah membantu dan mendukung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan, “*Tak ada gading yang tak retak*” itulah pepatah. Untuk itu dengan senang hati penulis bersedia menerima masukan, saran dan kritik agar skripsi ini dapat disempurnakan kedepannya dan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. *Amiin!*

Makassar, 25 Januari 2019

Penulis,

Suardi Jufri
NIM.40400112045

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Pengertian Peran Pemerintah	11
B. Pengertian Kebijakan Pemerintah.....	18
C. Peraturan Pemerintah tentang Perpustakaan	26
D. Konsep Pengembangan Perpustakaan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	35

C. Jenis dan Sumber Data	35
1. Data Primer	36
2. Data Sekunder	36
D. Instrumen Penelitian.....	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Variabel Penelitian.....	38
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Kabupaten Sinjai	40
1. Sejarah Singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Kabupaten Sinjai	40
2. Visi dan Misi	42
3. Sasaran dan Tujuan	42
4. Tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Kabupaten Sinjai	43
5. Layanan Perpustakaan.....	43
B. Hasil Penelitian	44
1. Peran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai	44
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Terhadap Pengembangan	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai	49
C. Pembahasan.....	52

1. Peran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai	53
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Terhadap Pengembangan	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Suardi Jufri
NIM : 40400112045
Judul Skripsi : Peran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai

Skripsi ini membahas tentang peran dan kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai dan kendala yang dihadapi Pemerintah terhadap pengembangan Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni: observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam rangkaperan dan kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai dengan cara melalui kebijakan teknis yaitu meningkatkan budaya baca di kalangan masyarakat kabupaten sinjai dengan kebijakan pemerintah daerah dalam ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai dengan menyediakan buku dan pengembangan budaya baca melalui sosialisasi dan publikasi, upaya meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan dan upaya peningkatan sarana dan prasarana. Adapun kendala yang menjadi penghambat dalam rangka peran dan kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai yaitu tidak lain daripada sumber dana (anggaran) dan sumber daya manusia yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

(kata kunci : Pengembangan, Perpustakaan)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era Globalisasi merupakan era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia. Perubahan terjadi begitu cepat di era globalisasi ini, terjadinya era globalisasi memberikan dampak itu bisa menguntungkan maupun merugikan. Dampak yang menguntungkan adalah di dalam era globalisasi diberikan kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya kepada negara-negara asing.

Namun jika kita tidak mampu bersaing dengan mereka, maka konsekuensinya akan merugikan bangsa kita. Mereka yang mampu bersaing adalah seseorang yang benar-benar telah mampu untuk menempatkan dirinya pada zaman modern. Hal itu bisa ditentukan pada kualitas pendidikan yang dimiliki. Bangsa yang berkualitas pada tingkat pendidikan akan mampu membawa bangsanya untuk menjadi sosok yang lebih baik dimasa mendatang.

Disisilain, rendahnya minat baca masyarakat yang menjadi salah satu tolak ukur kualitas pendidikan seolah-olah tidak kunjung ditemukan penyebab pastinya. Terlebih lagi di daerah yang terpencil sebagian besar penduduknya masih kurang memperdulikan pendidikan. Mereka cenderung menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dilestarikan. Mereka merasa lebih mengutamakan pernikahan di usia dini yang dianggap lebih berguna. Hal ini terjadi karena bermacam-macam faktor. Antara lain kurangnya akses pendidikan dan sulitnya menjangkau informasi global. Yang lebih memprihatinkan lagi

tingkat buta aksara di Indonesia belum sepenuhnya bisa diatasi, sebagian besar dari mereka berasal dari wilayah terpencil.

Wilayah terpencil merupakan wilayah yang sulit dalam hal berbagai aspek, dalam hal ini wilayah terpencil biasa juga didefinisikan sebagai wilayah yang masih jauh dari pelayanan umum, harga kebutuhan pokok yang sangat mahal sarana komunikasi yang kurang memadai dan sebaaiaan penduduknya masih kurang memperhatikan kemakmuran hidup. Akibatnya, tingkat kualitas hidup menurun dan kondisi untuk meningkatkan mutu pendidikan mengalami kesulitan. Karena hal ini perpustakaan umum hadir dikalangan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, dengan harapan bisa merubah pola pikir dan peningkatan mutu pendidikan. Karena di antara penduduk yang kurang mempunyai minat untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, ada pula sebagian masyarakat yang sebenarnya ingin meningkatkan mutu pendidikan. Khususnya bagi mereka yang menduduki sekolah formal di wilayah terpencil. Fasilitas ada namun belum sepenuhnya mendukung. Faktor ini membuat mereka membutuhkan asupan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Dalam permasalahan ini, pemerintah harus mengambil peran dan kebijakan yang begitu penting, dengan adanya Perpustakaan umum di setiap daerah mampu menjadi akses yang berkualitas dalam mengembangkan pendidikan diluar pendidikan formal. Pendidikan yang berkualitas dapat diandalkan dalam persaingan di era globalisasi. Namun, kesadaran pribadi akan hal ini nampaknya sangat kurang, terutama di kalangan non akademis. Hingga saat ini kondisi perpustakaan masih sangat dipertanyakan. Di kota besar pun masih banyak perpustakaan yang kondisinya kurang

memperhatikan. Bukan hanya dalam segi fasilitas, namun juga minimnya jumlah pengunjung. Sejauh ini pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk membangkitkan dan mengembangkan peran perpustakaan guna merangsang minat baca masyarakat. Menurut Kepala Perpustakaan Nasional usaha itu telah dilakukan melalui penunjukan duta baca maupun sosialisasi keliling tentang pentingnya budaya membaca hingga di berbagai wilayah. Diharapkan dalam kedepannya pemerintah lebih bisa menjadikan perpustakaan sebagai wadah yang berkualitas dalam menggali ilmu. Sehingga masyarakat non akademik yang tinggal di daerah terpencil mulai menyadari pentingnya budaya membaca dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Selain kurangnya perhatian dari pemerintah, terdapat beberapa faktor lain di perpustakaan seperti faktor dana dan kurangnya tenaga ahli. Sementara itu ada anggapan bahwa rendahnya kebiasaan membaca merupakan beberapa contoh dari lambatnya pengembangan perpustakaan di Indonesia (Fadillah Rahman, 2013:2)

Mengenai minat membaca tergolong masih sangat rendah terbukti UNESCO pada tahun 2012 melaporkan bahwa indeks minat baca masyarakat baru mencapai 0,001 artinya dalam setiap 1000 orang hanya ada satu orang yang memiliki minat baca (Kompasiana. Com, 04 Oktober 2015).

Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim sebagaimana yang tercantum dalam lima ayat yang pertama kali di turunkan, di situ tertera adanya perintah untuk “Membaca” (QS. Al-Alaq:1-5).

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Terjemahnya:

Bacalah dengan (*menyebut*) nama Tuhanmu yang menciptakan,dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah,yang mengajar (*manusia*) dengan perantara kalam.dia mengajar kepada manusia apa yang tidak di ketahuinya (Departemen Agama,2005;597).

Dalam ayat tersebut banyak memuat tentang anjuran membaca,seperti yang tercantum pada masing – masing ayat berikut ini :

1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha menciptakan.Hal ini berarti manusia diharapkan pandai membaca.
2. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. Hal ini berarti memberitahukan pada manusia tentang proses penciptaan manusia.
3. Bacalah dan Tuhanmu maha pemurah.Oleh ayat tersebut menyuruh agar manusia tahu keagungan tuhan .
4. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam,maksud dari ayat tersebut Allah mengajar manusiadari perantara baca.
5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui,ayat tersebut berarti manusia dapat pandai belajar.

Membaca (sebagaimana disebutkan dalam surat Al-alaaq diatas) merupakan bagian dari proses pendidikan.Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkerja sama dan salah satu komponen dalam pendidikan adalah belajar.

Menurut hasil penelitian Dwi Puspita Sari dalam tesisnya yang berjudul Kebijakan Pengembangan Perpustakaan Umum di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2013. Menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan perpustakaan umum di kabupaten karimun dilakukan dengan cara menyediakan bahan bacaan bermutu untuk perpustakaan umum kabupaten karimun, sehubungan dengan hal tersebut untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan menggunakan pelayanan perpustakaan keliling (Dwi Puspita Sari, 2012)

Berdasarkan hasil penelitian di atas, perbedaan yang menonjol dengan penelitian ini yaitu terfokus hanya pada peran dan kebijakan pengembangan perpustakaan dan arsip kabupaten sinjai.

Adapun salah satu aspek dari pemerintah daerah di kantor perpustakaan dan Arsip daerah kabupaten Sinjai yang harus di atur secara hati-hati adalah permasalahan dari pengembangan perpustakaan umum daerah di kabupaten sinjai yakni masih terbatasnya sarana dan prasarana yang belum mencerminkan suatu fasilitas dari perpustakaan yang ideal yang sesuai dengan tuntutan dan harapan pengguna/pengunjung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang peran dan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan perpustakaan daerah di kabupaten sinjai sesuai yang di butuhkan dan menjadikan perpustakaan tersebut berkualitas sesuai dengan fungsi dan tugasnya. untuk itu penulis memilih judul **“Peran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai”**

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok masalah yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan kebijakan Pemerintah terhadap Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah daerah terhadap pengembangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sinjai.?

C. *Fokus penelitian dan deskripsi fokus*

1. Fokus penelitian

Secara operasional ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Peran dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.

2. Deskripsi fokus

Fokus Penelitian di perlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah teknis yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis menganggap perlu mengemukakan defenisi dari beberapa kata yang terkandung dalam judul skripsi ini yaitu:

a. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Kita sering menulis kata peran tetapi kadang sulit untuk mengartikan definisi peran tersebut, peran biasa juga di sandingkan dengan fungsi.

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat di pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain begitupun sebaliknya (Soekanto, 2009:212-213).

Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah pemerintah daerah atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu lembaga atau instansi yang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu terkait penyelenggaraan pengembangan perpustakaan dan arsip daerah kabupaten sinjai.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

Istilah ini dapat di terapkan pada pemerintah, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu.

Dalam hal ini kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang di ambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan bertanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggaraan atas cara yang hendak dicapai dengan

pengembangan perpustakaan dan arsip kabupaten sinjai yakni Dinas Pendidikan dan Kepala Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai.

c. Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang – Undang di wilayah tertentu.

Dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu lembaga atau organisasi adalah kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.

d. Pengembangan

Pengembangan secara umum berarti perubahan secara perlahan(evolution) dan perubahan secara bertahap.

Menurut Seels dan Richey (Sumarno,2012:48) pengembangan berarti proses menterjemahkan atau manjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik.

Pengembangan adalah suatu upaya untuk meningkatkan mutu agar dipakai untuk berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat modern (tim penyusun dan pengembangan bahasa, 2007:2).

Dalam hal ini pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat bagi Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.

D. Kajian Pustaka

Dalam membahas judul “peran dan kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai” ada beberapa buku atau karya tulis yang penulis di anggap relevan diantaranya sebagai berikut :

1. *Upaya Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Paser Dalam Meningkatkan Minat Membaca Masyarakat di Perpustakaan Umum* oleh Fadillah Rahman tahun 2013, buku ini menjelaskan tentang beberapa faktor yang menghambat upaya meningkatkan minat baca di perpustakaan umum kabupaten paser dengan alasan ketersediaan koleksi yang belum lengkap.
2. *Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah Kota Surakarta* oleh Daryono tahun 2009, buku ini menjelaskan banyak tentang beberapa fungsi perpustakaan umum, dan peran pemerintah terhadap pengembangan perpustakaan umum daerah sesuai dengan amanat UUD 1945.
3. *Undang-undang no 43 tahun 2007 tentang perpustakaan*
4. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Kebijakan Perpustakaan Desa di KPADD Kabupaten Kayong Utara* oleh Ika Meiria Dian Saraswati tahun 2012, menjelaskan tentang beberapa kebijakan pemerintah dan pengelolaan sumber daya manusia untuk kebutuhan perpustakaan.

Dari sejumlah kajian pustaka tersebut di atas belum di temukan jurnal yang membahas secara khusus membahas seperti penelitian ini.

E. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran dan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan Dinas Perpustakaan Daerah di Kabupaten Sinjai.
- b. Untuk mengetahui kendala Peran dan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan Dinas Perpustakaan Daerah di Kabupaten Sinjai.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin diwujudkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan terhadap para peneliti lainnya yang tertarik untuk melakukan kajian yang sama.
- c. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti dan yang akan meneliti tentang topik yang sama.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Peran dan Kebijakan Pemerintah

1. Peran Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah seperangkat tingkat yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (KBBI, 2005:641). Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewajibannya, maka dia (aktor) menjalankan suatu peranan keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung yang lain begitupun sebaliknya peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2009:243).

Merton dan Raho mengungkapkan, peran merupakan suatu bentuk pola dari perilaku yang di harapkan ada oleh masyarakat kepada suatau individu yang menduduki suatu kedudukan ataupun jabatan tertentu (Raho, 2007:67).

Scott el al dan Kanfer menyebutkan lima aspek penting peran sebagai berikut :

- a. Peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya bukan individnya.
- b. Peran berkaitan dengan perilaku kinerja (*task behavior*), perilaku yang di harapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- c. Peran sulit di kendalikan (*role clarity dan role ambiguity*).

- d. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
- e. Peran dan pekerjaan (*jobs*) tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa memainkan beberapa peran (Kanfer, 1987: 197).

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas ekonomi dan Negara Kesatuan R.I sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 maksud dari pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberadaan perpustakaan merupakan salah satu peran dan kebijakan pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk dapat meningkatkan minat baca dan kesadaran akan pentingnya proses pembelajaran. Oleh karena itu, pada tahun 2007 pemerintah telah menetapkan undang-undang mengenai perpustakaan dan segala aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan perpustakaan terhadap peningkatan minat baca masyarakat, dan menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di seluruh pelosok tanah air serta memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Sesuai dengan isi undang-undang di atas, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjadikan perpustakaan sebagai manifestasi dari asas penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia yaitu pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, ke-profesionalan,

keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Disamping itu ketentuan ini akan turut membantu pemerintah dalam menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di seluruh wilayah tanah air.

Pemerintah di dalam penetapannya mengenai undang-undang tentang perpustakaan menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan, mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan, mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan serta berperan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan, yang pada akhirnya masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis sekalipun berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.

Sejauh ini perpustakaan memang telah mengalami perkembangan dalam hal pembangunannya. Terbukti banyak perpustakaan di wilayah perkotaan telah dapat dinikmati masyarakat secara baik, terlihat pada pembangunan perpustakaan di sekolah, dan perpustakaan umum di masyarakat umum. Berbeda dengan kondisi perpustakaan yang jauh dari keramaian. Terlebih lagi di wilayah terpencil. Meskipun telah banyak diupayakan adanya pembangunan perpustakaan di wilayah terpecil, namun hingga saat ini perubahannya masih jauh dari kata sempurna. Menurut lokasinya wilayah Terpencil merupakan wilayah yang sulit dalam berbagai aspek. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil cenderung lebih memilih untuk langsung bekerja, dibandingkan harus menimba ilmu di bangku sekolah. Hal tersebut juga menyebabkan budaya membaca di wilayah terpencil semakin berkurang. Maka diperlukan peranan pemerintah dalam

membangun dan mengelola perpustakaan umum sebagai sarana untuk masyarakat di wilayah terpencil yang ingin menikmati pentingnya menimba ilmu melalui membaca buku.

Adapun peranan pemerintah dalam mengembangkan perpustakaan di wilayah terpencil secara lebih terinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Melakukan penyuluhan ke daerah-daerah yang dianggap terpencil. Pada penyuluhan tersebut, diberikan informasi tentang pentingnya budaya membaca di semua kalangan masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang cinta membaca, maka diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga tercipta perpustakaan sebagai sumber belajar bagi masyarakat.

Memberikan anggaran terhadap pembangunan perpustakaan di daerah terpencil. Sehingga perpustakaan dapat berkembang tanpa terhambat masalah dana. Karena masalah yang menghambat berkembangnya perpustakaan sampai sekarang ini ialah kurangnya dana yang dimiliki oleh perpustakaan dan sedikitnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

Dengan adanya berbagai peranan tersebut diharapkan pemerintah mampu menempatkan posisinya secara baik dan maksimal. Sehingga hak masyarakat akan kebutuhan membaca dan meningkatkan kualitas pendidikan bisa terwujud, Serta mampu menyetarakan fasilitas akan perpustakaan tanpa melihat kondisi geografis.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Perpustakaan Nomor : 43 Tahun 2007 Pasal 8 Huruf A sampai dengan F yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah.
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing.
- c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
- d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah.
- f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Dari uraian diatas kita ketahui bahwa peran Pemerintah Daerah sangat besar terhadap perkembangan perpustakaan umum di daerahnya, selain adanya dukungan yang kuat dari masyarakatnya. Hal inilah kiranya yang dapat mendorong perlunya pemikiran oleh masyarakat dan Pemerintah untuk dikembangkan, agar perpustakaan umum berkembang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, yang pada akhirnya Perpustakaan daerah dapat berkiprah sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat yang mampu mengembangkan

potensi masyarakat serta mampu sebagai pusat pelestarian kekayaan budaya bangsa. Untuk mencapai kondisi di atas tidak terlepas dari peran Pemerintah daerah dalam hal ini bersama dengan Dinas pendidikan untuk mengambil kebijakan terkait pengembangan perpustakaan.

Setiap perpustakaan dapat mempertahankan eksistensinya apabila dapat menjalankan perannya. Secara umum beberapa peran yang dapat dilakukan pemerintah adalah :

a. Sebagai Pusat Informasi

Perpustakaan merupakan salah satu tempat yang memiliki peranan penting dalam memberikan suatu informasi. Hal ini dikarenakan sebuah perpustakaan pastinya mempunyai koleksi buku tidak hanya satu, bisa ratusan atau bahkan berpuluh-puluh ribu tahun lamanya. Yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis buku, seperti karya umum, filsafat, ensiklopedi dan lain-lain. Tidak hanya buku, perpustakaan sekarang juga dilengkapi dengan adanya koleksi majalah, koran ataupun artikel yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan juga ilmu.

b. Sebagai Pusat Inovasi

Perpustakaan sebagai tempat tersimpannya berbagai informasi yang dulu hanya sebagai tempat penyimpanan buku semata, kini juga sebagai tempat untuk tumbuhnya ide-ide yang kreatif. Dari ide-ide kreatif itulah dapat tercipta suatu karya yang apat bermanfaat bagi orang lain. Dan dari karya para pengguna perpustakaan inilah nantinya dapat pila muncul suatu wacana atau pun gagasan yang dapat dibaca dan digunakan oleh orang lain. Contohnya bila kita membaca

tentang buku pembudidayaan jamur. Jika orang tersebut adalah seorang yang kreatif, maka dari membaca buku itu bisa saja muncul ide untuk membudidayakan jamur dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang tentunya berguna bagi orang lain.

c. Sebagai Pusat Sumber Belajar

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini, terkait dengan kemajuan dibidang pendidikan dan adanya perbaikan metode belajar - mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana perpustakaan. Fungsi Pendidikan Perpustakaan merupakan sarana pendidikan nonformal dan informal. Artinya perpustakaan merupakan tempat belajar diluar bangku sekolah maupun dalam lingkungan pendidikan.

Untuk memelihara efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dengan adanya perpustakaan di sebuah sekolah atau perguruan tinggi dapat membantu pengguna perpustakaan bisa lebih cepat dalam membantu mencari literatur atau bahan untuk proses pembelajaran. Sehingga masyarakat dimana perpustakaan itu berada dapat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat dengan adanya perpustakaan tersebut. Untuk memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar dimana perpustakaan itu berada, kemudahan itu antara lain:

- 1) Kemudahan mencari informasi

- 2) Kemudahan mencari bahan pembelajaran
- 3) Kemudahan menemukan buku yang tidak dijual di toko buku.

Dalam penelitian ini, yang di maksud dalam Pemerintah daerah adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggaraan Pengembangan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Sinjai lembaga yang di maksud dalam penelitian ini yakni, Dinas Pendidikan dan Kepala Perpustakaan Daerah yang berperan sebagai peran utama dalam pengembangan perpustakaan daerah di Kabupaten Sinjai.

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pada prinsipnya di buat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Kinerja kebijakan adalah penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal (Rahardjo Adisasmita 2011:102). Yang di maksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Dalam hal ini kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang di ambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan cara yang hendak dicapai. Sedangkan pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat

Dalam rangka untuk upaya melestarikan kekayaan budaya bangsa yang dimiliki perlu segera pemerintah mengambil kebijakan memikirkan pengembangan perpustakaan umum yang ada di daerah ataupun kota. ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah antara lain:

a. Gedung

Sesuai dengan komitmennya bahwa sinjai sebagai kota beradab karena kita ketahui bersama Pemerintah Kota sampai sekarang tidak ada kebijakan yang berpihak pada pengembangan Perpustakaan, hal ini terbukti dari sejarah perkembangan Perpustakaan Umum dari tahun ke tahun tidak semakin baik, bahkan status gedung yang sampai hari ini bisa di katakan tidak ada perubahan.

Dengan kondisi yang demikian ini Pemerintah harus mengambil kebijakan terkait pembangunan Gedung Perpustakaan Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Lokasi Gedung strategis, mudah diakses oleh masyarakat umum, nyaman dan tidak gaduh/bising, serta dapat mendukung program pembelajaran bagi masyarakat umum.
- 2) Gedung didesain sedemikian rupa yang dapat mendukung proses kegiatan layanan kepada masyarakat secara umum.
- 3) Gedung juga dilengkapi sarana penunjang kegiatan masyarakat umum (Ruang Seminar, Ruang Public, Taman baca rekreatif, dll).

b. Sarana Prasarana

Perpustakaan agar dapat menjalankan fungsinya dan memberikan layanan kepada masyarakat pengguna dengan baik dan berkualitas perlu didukung adanya sarana prasarana yang memadai pula, yang antara lain meliputi :

- 1) Sarana Komputer untuk pengembangan sistem komputerisasi perpustakaan, karena dengan sarana ini pengelola perpustakaan akan bekerja dengan mudah, cepat dan efektif, serta masyarakat akan dengan mudah mengakses informasi yang ada di perpustakaan tanpa batas waktu dan tempat.
- 2) Sarana pendukung lainnya, seperti ruang baca yang representatif dan memadai, mebel (meja kursi baca) yang nyaman, dan tata ruang yang terstruktur, sehingga dengan kondisi tersebut, masyarakat pengguna akan merasa nyaman didalam memanfaatkan perpustakaan.
- 3) Taman baca rekreatif, untuk menumbuhkan minat atau budaya anak pada khususnya dan masyarakat pengguna pada umumnya.
- 4) Sarana Public Area (Hotspot) untuk memudahkan kepada masyarakat didalam akses informasi ke dunia luar.

c. Sumber Daya Manusia

Efektivitas dalam suatu organisasi secara langsung tergantung pada efektivitas kerja sumber daya manusianya untuk mencapai efektivitas kerja sumber daya manusia yang unggul dapat selalu dikembangkan dengan upaya kualitas sumber daya manusia (Widjaja, 2004:79). Memang tidak dapat dipungkiri kualitas dari sumber daya manusia merupakan factor utama keberhasilan sebuah

perpustakaan, oleh karena itu sumber daya manusia harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah agar Perpustakaan Umum dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan optimal, maka pihak Pemerintah, segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Tenaga perpustakaan yang ada perlu segera dibekali pengetahuan tentang perpustakaan dan teknologi informasi dengan mengirim ke berbagai kegiatan antara lain :
 - a) Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Perpustakaan
 - b) Magang ke Perpustakaan yang telah menerapkan sistem otomasi
 - c) Pendidikan Formal (D2/D3 Ilmu Perpustakaan)
- 2) Adanya penambahan tenaga perpustakaan dengan kualifikasi pendidikan minimal D2 Ilmu Perpustakaan dengan cara membuka formasi atau lowongan CPNS Pustakawan
- 3) Mempekerjakan tenaga Part Time, honorer, magang dari mahasiswa program diploma III ilmu perpustakaan.

Dalam perencanaanya, pembinaan sumber daya manusia dilakukan dengan Menentukan terlebih dahulu pengelola perpustakaan mana yang nantinya akan mendapat giliran untuk dibina, dalam hal pembinaan dalam pengelolaan perpustakaan dalam segi peningkatan anggaran untuk menunjang kualitas dan kuantitas yang ada di perpustakaan, oleh karenanya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan adanya sumber daya manusia yang cuup didukung keahlian dan kemampuannya. Sumber daya yang utama dalam implementasi adalah implementator itu sendiri (sumber daya manusia), kegagalan implementasi

juga dapat disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya (Ika Meiria Dian Saraswati, 2012:5).

Dalam upaya peningkatan kualitas SDM ada beberapa program yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur khususnya dibidang perpustakaan. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini diselenggarakan dengan mengikutisertakan pegawai-pegawai dalam bentuk kegiatan diklat, seminar-seminar, dan bimbingan dari bidang perpustakaan. Adapula implementasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di perpustakaan umum dimana terdapat dalam pergerakan sumber daya manusia yang tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Perpustakaan. Salah satu cara untuk menggerakkan sumber daya manusia adalah dengan memberikan *reward and punishment*.

d. Koleksi

Koleksi atau bahan pustaka merupakan proses awal dalam mengisi perpustakaan dengan sumber informasi. (Sutarno,2006:174)

Koleksi adalah rangkaian kegiatan untuk menghimpun dan menyeleksi bahan pustaka yang sekaligus berdasarkan peraturan kebijakan pengadaan bahan pustaka sehingga dapat memenuhi bahan pustaka yang diminati oleh pengunjung.

Koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum saat sekarang sangat terbatas, belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan kalau kita sesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini masih jauh dari kebutuhan. Koleksi merupakan modal utama bagi sebuah

perpustakaan, dimana koleksi merupakan produk informasi yang akan di jual kepada pengguna, apabila produk tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan para pelanggan, sudah barang tentu para pelanggan berlahan-lahan akan meninggalkan dan tidak membelinya (memanfaatkannya).

Dari kondisi yang ada perlu dikaji secara bersama bahwa di era globalisasi informasi dewasa ini sudah waktunya Pemerintah memikirkan pengembangan Perpustakaan, dalam hal pengembangan koleksi perpustakaan dengan memprioritaskan :

- 1) Anggaran khusus untuk pengadaan bahan pustaka/koleksi di setiap tahun anggaran
- 2) Koleksi yang dibeli disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu yang ada.
- 3) Didalam pengadaan bahan pustaka dapat melibatkan berbagai pihak termasuk para pengguna dapat mengusulkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pengadaan akan dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan sumber belajar apabila dalam perpustakaan tersebut tersedia banyak bahan pustaka. Dengan adanya bahan-bahan pustaka kita dapat belajar dan mencari informasi yang diinginkan. Sedangkan perpustakaan yang kurang memiliki bahan-bahan pustaka, atau jarang bahkan tidak pernah ditambah dengan bahan-bahan pustaka yang baru akan ketinggalan zaman dan lambat laun pengunjung kurang senang mengunjungi perpustakaan. Oleh sebab itu perlu pengadaan bahan-bahan pustaka secara terus menerus.

Pengadaan koleksi adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh petugas atau pustakawan sekolah dengan cara-cara seperti pembelian, hadiah, atau sumbangan, swadaya masyarakat setempat, tukar-menukar dengan perpustakaan yang lain yang sejenisnya dengan prosedur masing-masing dan sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya (Prastowo, 2012:141)

e. Layanan

Di Era Teknologi Informasi dewasa ini Perpustakaan umum dalam rangka upaya peningkatan kualitas layanan kepada pengguna dapat mengembangkan sistem layanan terotomasi atau komputerisasi, dengan sistem otomasi semua pekerjaan yang ada dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, bahkan informasi yang ada di perpustakaan akan dapat diakses dengan mudah oleh para pengguna dari berbagai tempat. Selain sistem otomasi layanan ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Perpustakaan antara lain :

- 1) Jam layanan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sedapat mungkin layanan perpustakaan sampai dengan malam hari.
- 2) Layanan Perpustakaan Keliling, untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat pengguna perlu ditingkatkan agar layanan lebih optimal, dengan cara koleksi atau bahan pustaka yang disajikan ditambah dan bervariasi, serta waktu layanan diberikan secara terjadwal dan rutin, sehingga pengguna dapat memanfaatkan secara baik dan optimal.
- 3) Perlu dikembangkan Layanan Internet (Hotspot) secara gratis dan terbuka bagi masyarakat umum.

Upaya Pengembangan Perpustakaan umum adalah suatu tempat dimana para semua golongan memperoleh akses informasi dan pengetahuan dalam rangka untuk mendukung proses pembelajaran dengan melalui penyediaan bahan pustaka yang sesuai dengan kurikulum standar internasional.

Mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi penting karna dapat memberikan manfaat bagi organisasi yang bersangkutan (Harbani Pasolong, 2013:134).

Kondisi perpustakaan secara umum masih sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Rendahnya persentase anggaran yang dialokasikan untuk fasilitas perpustakaan (pengadaan bahan pustaka).
- 2) Belum adanya pengelola (pustakawan) yang bertanggung-jawab untuk mengelola perpustakaan secara profesional, kebanyakan pengelola perpustakaan dibebankan oleh guru yang tidak memiliki jam mengajar.
- 3) Belum tersedianya gedung atau ruang Perpustakaan yang didesain khusus untuk layanan perpustakaan.
- 4) Lemahnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mencari terobosan terkait dengan pendanaan dan pengembangan perpustakaan sekolah.
- 5) Tidak adanya pengintegrasian antara pelayanan perpustakaan dengan kurikulum sekolah.

Sebagai organisasi pelayanan publik dituntut untuk menyediakan pelayanan informasi yang aktual, tepat waktu, cepat, berkelanjutan dan mudah

diakses sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengunjungnya maka diperlukan suatu komitmen disertai kinerjanya sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah No.2 tahun 2010 pasal 12 tentang layanan perpustakaan terdapat pada ayat (1) dan (4) yang berbunyi : Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka dan pada ayat (4): layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

Untuk mengatasi beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas perpustakaan tersebut diatas, Pemerintah Dinas Pendidikan serta Kepala kepala perpustakaan dapat melakukan berbagai terobosan dalam rangka meningkatkan kualitas perpustakaan dengan merancang dan mengimplementasikan dengan melibatkan berbagai pihak.

3. Peraturan Pemerintah tentang Perpustakaan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat Manusia, Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu karena ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin

cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya.

Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society– WSIS, 12 Desember 2003.

Dua kali pertemuan dalam membangun masyarakat informasi global telah terjadi. Pertemuan pertama dilaksanakan di Geneva, Swiss pada tanggal 10-12 Desember 2003. Pertemuan kedua terlaksana di Tunisia pada tanggal 16-18 November 2005. Pertemuan Geneva menghasilkan 67 butir prinsip dalam

membangun masyarakat informasi yang berpusat pada manusia, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang setiap warganya dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi dan pengetahuan. Oleh sebab itu dalam masyarakat tersebut diharapkan perorangan, kelompok, dan masyarakat luas dapat menggunakan penuh potensinya dalam melakukan pembangunan berkesinambungan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Sebagai kesepakatan dunia, kesepakatan WSIS dengan sendirinya juga harus mendukung kesepakatan sebelumnya seperti yang telah dilakukan dalam MDGs. Oleh sebab itu dalam membangun masyarakat informasi perhatian khusus diberikan kepada kebutuhan khusus masyarakat rentan dan yang terpinggirkan. Termasuk dalam kelompok ini adalah kaum migran; masyarakat tergeser dan para pengungsi; para penganggur dan masyarakat terlupakan, kelompok minoritas dan nomad (masyarakat pengembara), orang tua dan penyandang cacat. Selanjutnya juga ditegaskan upaya pemberdayaan kaum miskin, khususnya yang hidup di daerah terpencil, desa, dan pinggiran kota. Akses informasi dan pengetahuan dimaksudkan dapat mereka pakai untuk juga mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Masyarakat informasi bertumpu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Menyadari kesenjangan akses teknologi di masyarakat tersebut, maka lembaga publik seperti sekolah, perpustakaan, kantor arsip, museum, pusat kebudayaan, maupun kantor pos hendaknya dapat dipakai sebagai titik akses informasi maupun kepada teknologi tersebut oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu

perlu dikembangkan program penguatan lembaga-lembaga publik tersebut. Promosi pelestarian hasil budaya bangsa perlu dikerjakan oleh lembaga seperti perpustakaan, arsip, museum dan pusat kebudayaan.

Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif, berpusatpada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan padapeningkatan mutu hidup. Indonesia telah merdeka lebih dari (70 tujuh puluh) tahun, tetapi perpustakaan ternyata belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat.

Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu system nasional perpustakaan. Sistem itu merupakan wujud kerja sama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan di Indonesia demi memungkinkan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat dan demi mempercepat tercapainya tujuannasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan pusat dan daerah dalam bidang perpustakaan. Keberadaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai LPND berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tidak lagi memiliki kekuatan efektif dalam

melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman kebijakan dalam pengembangan perpustakaan di daerah secara umum pada satu sisi menguntungkan sebagai pendelegasian kewenangan kepada daerah. Namun, di sisi lain dianggap kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan perpustakaan yang andal dan profesional sesuai dengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku karena bervariasinya kemampuan manajemen dan financial yang dimiliki oleh setiap daerah serta adanya perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan. Sejumlah warga masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau perpustakaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun, upaya sebagian kecil masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar.

Untuk itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan Bangsa. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan

perpustakaan di Indonesia sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

4. Konsep Pengembangan Perpustakaan

Penerapan Teknologi Informasi (TI) saat ini telah menyebar hampir di semua bidang tidak terkecuali di perpustakaan. Perpustakaan sebagai institusi pengelola informasi merupakan salah satu bidang penerapan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat. Perkembangan dari penerapan teknologi informasi bisa kita lihat dari perkembangan jenis perpustakaan yang selalu berkaitan dengan dengan teknologi informasi, diawali dari perpustakaan manual, perpustakaan terautomasi, perpustakaan digital atau cyber library.

Ukuran perkembangan jenis perpustakaan banyak diukur dari penerapan teknologi informasi yang digunakan dan bukan dari skala ukuran lain seperti besar gedung yang digunakan, jumlah koleksi yang tersedia maupun jumlah penggunaannya.

Kebutuhan akan TI sangat berhubungan dengan peran dari perpustakaan sebagai kekuatan dalam pelestarian dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang seiring dengan menulis, mencetak, mendidik dan kebutuhan manusia akan informasi.

Perpustakaan membagi rata informasi dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, mengelola dan menyediakanya untuk umum. Penerapan teknologi informasi di perpustakaan dapat difungsikan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Penerapan teknologi informasi digunakan sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan. Bidang pekerjaan yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi perpustakaan adalah pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan pustaka, pengelolaan anggota, statistik dan lain sebagainya. Fungsi ini sering diistilahkan sebagai bentuk Automasi Perpustakaan.
- b. Penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan dan menyebarkan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital. Bentuk penerapan TI dalam perpustakaan ini sering dikenal dengan Perpustakaan Digital.

Kedua fungsi penerapan teknologi informasi ini dapat terpisah maupun terintegrasi dalam suatu sistem informasi tergantung dari kemampuan software yang digunakan, sumber daya manusia dan infrastruktur peralatan teknologi informasi yang mendukung keduanya.

Dalam konsep pengembangan perpustakaan ini selanjutnya akan membahas tentang automasi perpustakaan.

- a. Faktor penggerak
 - 1) Kemudahan mendapatkan produk TI.
 - 2) Harga semakin terjangkau untuk memperoleh produk TI
 - 3) Kemampuan dari teknologi informasi.
 - 4) Tuntutan layanan masyarakat serba “*click*”

b. Alasan lain

- 1) Mengefisienkan dan mempermudah pekerjaan dalam perpustakaan.
- 2) Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna perpustakaan.
- 3) Meningkatkan citra perpustakaan.
- 4) Pengembangan infrastruktur nasional, regional dan global.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis yaitu proses yang digunakan dalam penelitian itu dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. (Sugiyono, 2014: 2)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapat suatu data atau informasi yang diinginkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode penulisan yang baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya dengan menggunakan beberapa informan, adapun metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivitas, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. (Sugiyono, 2014:9)

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2013:6)

Penelitian yang menggunakan wawancara untuk mendeskripsikan data yang penulis peroleh dari informasi untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang peran dan kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai.

B. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini direncanakan selama 1 bulan, dari tanggal 10 Oktober sampai dengan 10 November tahun 2018 dan penelitian ini mengambil lokasi di perpustakaan umum daerah Kabupaten Sinjai dan Pemerintah Daerah yang terkait terhadap pengembangan perpustakaan daerah di Kabupaten Sinjai dalam hal ini Dinas Pendidikan sebagai tempat penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bukti dan bahan dasar kajian. Sedangkan sumber data adalah subjek dimana data

diperoleh (Arikunto, 2006:79). Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data yang berkenaan dengan penelusuran informasi di perpustakaan daerah Kabupaten Sinjai dan Dinas Pendidikan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari informasi yaitu kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dan Kepala Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai. Dengan memberi sejumlah pertanyaan sebagai instrumen penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer berupa dokumen-dokumen atau laporan yang dapat mendukung pembahasan dalam kaitannya dengan penelitian ini data informasi.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable, apabila instrument tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. (Sugiyono, 2014: 222)

Adapun instrumen penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

1. Instrumen pertama yang penulis gunakan adalah wawancara, yakni sejumlah daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab dengan informasi untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan.
2. Instrumen kedua adalah observasi, yakni pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap objek penelitian kemudian mencatat hal-hal yang dianggap perlu sehubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi, yaitu penulisan secara langsung melihat dan mengadakan penyelidikan (pengamatan) pada tempat yang dijadikan tempat penelitian (Suharsimi dan Arikunto, 2006:133)

2. Wawancara (Interview)

Wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiono, 2014:231)

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiono, 2014:240)

F. Variabel Penelitian

Secara teoritis variable dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain (Hatch dan Farhady, 1981). Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja, merupakan atribut-atribut dari setiap orang. Struktur organisasi, model pendelegasian, kepemimpinan, pengawasan, koordinasi, prosedur dan mekanisme kerja, deskripsi pekerjaan, kebijakan, adalah merupakan contoh variable dalam kegiatan administrasi (Sugiyono, 2014:38), bahwa variable adalah obyek penelitian yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti ini mempunyai variable yaitu Peran dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap pengembangan perpustakaan Daerah di Kabupaten Sinjai.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, makalangkah berikutnya adalah pengelolaan dan analisis data. Yang dimaksud dengan analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan keadaan unit, melakukan sentesa, menyusun kedalam pola, memilih

mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri atau orang lain. Kemudian setelah itu penulis melakukan wawancara informasi tersebut, dan mencatat hasil dari wawancara. Berdasarkan dari hasil analisis wawancara, selanjutnya penelitian menuliskan skripsi penelitian kualitatif (Sugiono, 2014:243).

Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Salim (2006:20), menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni:

1. Penyajian Data (data display)

Pada penelitian kualitatif, dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau bahkan tidak jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

BAB IV

**PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PENGEMBANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SINJAI**

A. Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai

1. Sejarah singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 tahun 2000 tentang program Pembangunan Daerah (PROPEDA) tujuan dibentuknya perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai yaitu untuk meningkatkan kegemaran membaca dan membantu para muda mudi, masyarakat baik itu dari kalangan pendidikan formal maupun non formal. Perpustakaan ini berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

Pada tahun 2001 sampai dengan 2003 Ruang bagian Perpustakaan masih selokasi dengan Kantor Pariwisata dan Kantor Dinas Tata Ruang yang bertempat di sebelah Utara Gedung Dharma Wanita Kabupaten Sinjai tepatnya di Jalan Garuda, karena gedung perpustakaan masih dalam tahap proses pembangunan kemudian berpindah lagi ke jalan Persatuan Raya dan bersebelahan dengan kantor pos Kabupaten Sinjai.

Pada tahun 2003 Gedung Perpustakaan telah di resmikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dalam hal ini bapak H. Moh Roem SH.Msi dalam hal ini Bupati Sinjai yang menjabat pada saat itu, gedung perpustakaan yang telah di resmikan terdiri dari dua lantai dan lantai pertama adalah ruang perpustakaan dan

lantai dua adalah ruangan arsip yang bertempat di jalan kartini di sebelah selatan Kantor Dinas Pendidikan dan di sebelah barat Rumah Jabatan Bupati Sinjai.

Dalam perkembangannya, perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai telah terjadi pergantian kepemimpinan di antaranya :

- a. Drs. Nurdin Said. Tahun 2001-2003
- b. Drs. H. Hairil Anwar, M.Ed. Tahun 2003-2005
- c. Drs.H .Akmal MS. Tahun 2005-2012
- d. La Baba Paisal, S.H.M.Pd. Tahun 2012-2013
- e. Drs. Bajuddin, M.Pd. Tahun 2014-2016
- f. Plt. Drs. M. Zuhri. N bulan Oktober-Desember 2016
- g. La Baba Paisal, S.H.M.Pd. Tahun 2017 sampai sekarang ini

Pada saat dipimpin oleh Drs. H. Akmal MS. Perpustakaan Daerah mengalami

perkembangannya yang sangat pesat. Terbukti, Perpustakaan daerah Kabupaten Sinjai berhasil memperoleh piala tahun 2006 sebagai Perpustakaan daerah terbaik dalam lomba perpustakaan yang digelar oleh Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan. Dan Tahun 2014 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sinjai memberikan warna baru di dunia kearsipan dapat meraih juara harapan III dalam Lomba Lembaga Kearsipan Daerah Teladan Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dibawah komando Drs. Bajuddin,M.Pd.

Pada tanggal 31 Desember 2016 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi berganti nama menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang diresmikan oleh Bupati Sinjai dan dikepalai oleh Bapak La Baba Paisal, SH.M.Pd.

Adapun dasar pembentukan perpustakaan daerah kabupaten sinjai yaitu:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPERDA)
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 tahun 2000 tentang Garis-garis Besar Haluan Daerah (GBHD) Kabupaten Sinjai.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 30 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Kabupaten Sinjai.

2. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai

a. Visi

Terwujudnya Sinjai lebih maju dan unggul dalam pengembangan perpustakaan dan pengelolaan arsip dalam era Globalisasi dan Informasi.

b. Misi

- 1) Melengkapi sarana pengelolaan ke arsip dan dokumentasi.
- 2) Memotifasi masyarakat untuk meningkatkan minat baca dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan perpustakaan dan arsip.
- 4) Mengembangkan peranan sebagai pusat informasi di segala bidang.

3. Tujuan dan Sasaran perpustakaan Kabupaten Sinjai

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan kinerja pengelola arsip dan perpustakaan.
- 2) Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kegemaran membaca.
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan siswa dan wawasan masyarakat.

- 4) Pengguna jasa arsip dan perpustakaan selalu merasa terdorong untuk berkunjung ke kantor perpustakaan dan arsip.
- 5) Agar arsip dan koleksi perpustakaan semakin bertambah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

b. Sasaran yang akan di capai

Berdasarkan kebijakan program dinas perpustakaan dan arsip untuk tahun 2018, maka telah di susun program kerja yang menjadi sasaran kerja dari dinas perpustakaan dan arsip kabupaten sinjai yang akan di jabarkan oleh masing-masing seksi, berupa rencana rutin dan pembangunan.

4. Tugas pokok perpustakaan Dinas perpustakaan Kabupaten Sinjai

Dinas perpustakaan dan arsip Kabupaten Sinjai berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan arsip yaitu:

- a. Menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang arsip dan perpustakaan.
- b. Mengupayakan tercapainya kabupaten sinjai lebih maju dalam pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh bupati.

5. Layanan perpustakaan

- a. Pelayanan teknis
- b. Pelayanan pengunjung di tempat (intern) yang dilaksanakan sebagai berikut :

Waktu melayani pengunjung pada pagi hingga sore hari

- 1) Senin s/d Kamis : Pukul 08.00- 15.30
- 2) Jum'at : Pukul 08.00- 15.30
- 3) Istirahat : Pukul 11.30- 13.00
- 4) Sabtu : Pukul 08.00- 11.00

Waktu melayani pengunjung pada malam hari :

- 1) Malam Selasa s/d malam Minggu : Pukul 19.30- 22.00
- 2) Malam Senin : Libur

B. Hasil Penelitian

Sesuai dengan metodologi penelitian, maka pada bagian ini peneliti akan menguraikan dan membahas hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Peran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan. Adapun peran dan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. Meningkatkan budaya baca di kalangan masyarakat kabupaten sinjai

Berkaitan dengan program upaya pihak pemerintah dalam hal ini dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai dalam meningkatkan budaya baca masyarakat perlu adanya kebijakan-kebijakan teknis operasional yang sudah dilakukan pemerintah dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai

diantaranya : 1. Kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan buku. 2. Pengembangan budaya baca melalui sosialisasi dan publikasi.

Budaya baca adalah Suatu sikap dan tindakan/perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan (Sutarno,2006:27).

Salah satu elemen yaitu kebijakan dari pemerintah daerah kabupaten sinjai yang sangat berperan dalam pengembangan minat baca masyarakat, terbukti bahwa sejauh mana komitmen pemerintah daerah kabupaten sinjai terhadap penyediaan buku untuk perpustakaan daerah di kabupaten sinjai. Selain itu juga instansi-isntansi yang berkaitan turut andil menyumbangkan sebagian buku untuk perpustakaan. Oleh karna itu, dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai perlu adanya mekanisme koordinasi dengan instansi lain dan masyarakat umum pada khususnya, tidak terlepas dari adanya pendekatan kebijakan. Dengan adanya koordinasi ini maka akan ada suatu program atau kegiatan dapat berjalan lancar dan sesuai yang di rencanakan. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan informan I selaku kepala dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai adalah sebagai berikut ;

“Sejak dua tahun terakhir ada beberapa bentuk kerjasama kita yang pertama dinas perpustakaan kabupaten sinjai, yang kedua adalah ada dua perguruan tinggi yang ada di kabupaten sinjai yaitu stisip dan staim, kemudian kodim dan lembaga pemasyarakatan di kabupaten sinjai dalam rangka meningkatkan budaya baca” (La Baba Faisal, SH. M.Pd, Senin 22 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara diatas sejalan dengan jawaban dari informan II dalam hal ini kepala dinas pendidikan kabupaten sinjai yang menyatakan :

“Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam hal menyediakan menyediakan buku-buku referensi yang merupakan sumber bacaan masyarakat umum maupun pelajar siswa,SMP,SMA dan Perguruan Tinggi dinas pendidikan melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai untuk mendorong minat baca peserta didik dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal pengembangan” (Drs. H. Syamsuddin, MM, Senin 05 November 2018).

Dari hasil wawancara di atas di ketahui bahwa dalam pengelolaan program pengadaan buku dinas perpustakaan dan kearsipan melakukan kerja sama dengan dinas pendidikan. maka dari itu, pemerintah sudah berupaya beroptimal dalam menyediakan bahan bacaan untuk perpustakaan umum di kabupaten sinjai, tersedianya bahan bacaan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan prinsip pengembangan minat membaca masyarakat dalam berkunjung ke perpustakaan, sehubungan dengan hal tersebut dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai melakukan kegiatan sosialisasi dan hal ini dapat dilihat dilihat dari hasil wawancara dengan informan III selaku pustakawan di bagian pengembangan yang mengatakan :

“disini kita dek setiap tahunnya melakukan pengadan buku dan buku-buku itu bervariasi dari SD,SMP,SMA,sampai Perguruan Tinggi dan setiap tahunnya pengadaan buku itu bertambah sesuai daripada kebutuhan pengunjung selain itu kita biasa melaksanakan kegiatan sosialisasi secara langsung yaitu dengan survei dan mendatangi setiap sekolah yang ada di kecamatan serta di daerah yang pelosok (H. Hasniah, Senin 29 Oktober 2018).

Berdasarkan dari pernyataan informan diatas dapat di ketahui bahwa pengadaan buku bahan pustaka di perpustakaan hanya satu kali dalam setahun.

Kemudian informan III menambahkan lagi :

“selain sosialisasi langsung melalui pelayanan perpustakaan keliling kami juga ada kegiatan melakukan perlombaan” (H. Hasniah, Senin 29 Oktober 2018).

Berdasarkan dari pernyataan informan diatas dapat di ketahui bahwa dalam rangka pengembangan perpustakaan ada beberapa program yang telah di laksanakan seperti diantaranya sosialisasi, mengadakan perlombaan dan pelayanan perpustakaan keliling.

b. Upaya meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan

Selain daripada meningkatkan minat baca di perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai, pihak pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan. Perpustakaan umum sebagai pelayanan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang aktual, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah di akses dengan kebutuhan dan keinginan pengunjungnya. Mengetahui kualitas pelayanan yang di berikan oleh suatu organisasi penting karna dapat memberikan manfaat bagi organisasi yang bersangkutan (Harbani Pasolong, 2013 : 134). Dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai memberikan layanan perpustakaan dengan sistem terbuka, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan

III selaku pustakawan di bagian pelayanan yang menyatakan ;

“yang kita terapkan di sini sistem layanan terbuka apa itu layanan terbuka maksudnya itu pengunjung langsung mencari buku di rak dan kami juga menyediakan sistem jenis layanan yang diberikan kantor dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai terdiri dari layanan ruang baca dan layanan informasi (Drs. Jusri, Rabu 31 Oktober 2018).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan di atas bahwa dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai melakukan sistem layanan terbuka, layanan informasi dan layanan ruang baca layanan ini disediakan untuk membaca buku dan melakukan kegiatan proses belajar mengajar di perpustakaan.

c. Upaya peningkatan sarana dan prasarana

Perpustakaan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan memberikan layanan kepada masyarakat pengguna perlu didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai pula diantaranya : Sarana komputer untuk sistem pengembangan komputerisasi, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, perlengkapan gedung kantor, dan peralatan gedung kantor. Adapun peran pemerintah dalam peningkatan sarana dan prasarana di kantor dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan I dalam hal ini kepala dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai yang menyatakan :

“jadi penyediaan sarana dan prasarana kami sudah punya gedung berdiri sekitar 18 tahun dan untuk sekarang ini dilakukan rehabilitasi dengan tujuan disamping perbaikan ada perluasan sekitar 4x25 M dan dibelakang sekitar 2x25 M jadi itulah perluasan sehingga gedung ini di manfaatkan dengan baik dan bisa menampung pemustaka dan pengunjung” (La Baba Faisal, SH. M.Pd,Senin 22 Oktober 2018).

Dari pernyataan informan diatas dapat di ketahui bahwa untuk sementara gedung perpustakaan sedang dalam tahap rehabilitasi sehingga peyediaan sarana lain seperti komputer dan peralatan kantor belum dianggarkan sebagai mana yang ungkapkan informan selanjutnya

“Penyerapan dana yang ada di dinas perpustakaan saat ini masih berada pada dana APBD jadi tidak ada dana dana APBN kecuali berupa bantuan kemarin seperti mobil perpustakaan keliling itu kami diberikan dalam bentuk barang sehingga penyerapan dana itu untuk semua program kegiatan yang ada ” (La Baba Faisal, SH. M.Pd,Senin 22 Oktober 2018).

Dari pernyataan informan diatas dapat di ketahui bahwa untuk saat ini masih berada pada dana APBD dan untuk mendapatkan dana alokasi khusus di lakukan secara bertahap sehingga dalam hal penganggaran dilakukan secara bertahap.

2. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Terhadap Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai

Adapun kendala yang dihadapi pemerintah terhadap pengembangan dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai diantaranya :

a. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Dharma Setyawan Salam,2004:158). Oleh karna itu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan adanya sumber daya manusia yang cukup didukung keahlian dan kemampuannya.diluar sumber daya manusia sumber daya lain juga diperhitungkan seperti sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karna, ketika sumber daya tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Adapun hasil wawancara penulis kepada informan I terkait masalah diatas sebagai berikut:

“Untuk sementara sumber daya yang kompeten masih sangat terbatas, bahkan tenaga pustakawan dan kearsipan itu boleh dikatakan tidak ada karna untuk arsip aris telah mengajukan pensiun dini jadi kemungkinan kami tidak punya pustakawan dan arsip aris sehingga kami harus mengusulkan ke Bupati melalui badan kepegawaian daerah untuk pengadaan pustkawan dan arsip aris kemudian tenaga yang ada sekarang ini masih sangat terbatas dan kemampuan tentang ilmu kepustakawanan masih perlu ditingkatkan dan masih perlu pelatihan-pelatihan dan sekaligus bimbingan teknis senhingga bisa melakukan pengelolaan di perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai” (La Baba Faisal, SH. M.Pd,Senin 22 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tenaga pustakawan dan arsip aris yang ada di Perpustakaan Kabupaten Sinjai saat ini kurang kemudian tenaga yang masih sangat terbatas dalam hal ilmu kepustakaan dan perlu adanya bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan khusus.

Kemudian informan tersebut menambahkan lagi :

“Tenaga pustakawan dan arsip aris itu harus betul-betul segera diadakan karna merupakan tenaga fungsional yang mempunyai keahlian khusus sedangkan untuk pengelola pustakawan hanya perlu pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dibidangnya masing-masing” (La Baba Faisal, SH. M.Pd, Senin 22 Oktober 2018).

Dari kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi ialah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kegagalan implementasi juga dapat disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

b. Sumber Dana

Memberikan anggaran terhadap pembangunan perpustakaan di daerah terpencil. Sehingga perpustakaan dapat berkembang tanpa terhambat masalah dana. Karena masalah yang menghambat berkembangnya perpustakaan sampai sekarang ini ialah kurangnya dana yang dimiliki oleh perpustakaan dan sedikitnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

Selain daripada itu anggaran (dana) juga merupakan faktor penting dalam menunjang program kegiatan yang hendak dicapai

berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai dapat di ketahui :

“Secara umum alokasi khusus pada dasarnya sudah ada diarahkan oleh seluruh kabupaten kota di indonesia namun untuk tahun 2018 ini masih sngat terbatas untuk separuhnya seluruh kabupaten kota dan tahun ini kami telah memprogramkan alokasi khusus itu namun tidak mendapatkan jatah untuk tahun 2019 sehingga diprkirakan akan mendapatkan alokasi khusus sekitar tahun 2020” (La Baba Faisal, SH. M.Pd,Senin 22 Oktober 2018).

Kemudian informan menambahkan :

“Penyerapan dana yang ada di dinas perpustakaan saat ini masih berada pada dana APBD jadi tidak ada dana dana APBN kecuali berupa bantuan kemarin seperti mobil perpustakaan keliling itu kami diberikan dalam bentuk barang sehingga penyerapan dana itu untuk semua program kegiatan yang ada ” (La Baba Faisal, SH. M.Pd,Senin 22 Oktober 2018).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa faktor penghambat dalam dalam menjalankan program yang direncanakan adalah keterbatasan sumber dana yang menjadikan kurang berjalannya sutu kebijakan.

Kemudian belum adanya aturan baku yang diterapkan yang diterapkan pemerintah dalam hal pengembangan perpustakaan dan kearsipan hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan informan dalam hal ini kepala perpustakaan :

“Aturan baku yang diterapkan saat ini kita hanya menyatu pada UU No 43 Tahun 2007 sehingga dibidan kearsipan UU No 43 Tahun 2009 dan untuk tahun ini perda kearsipan akan lahir dan sementara pembahasan di DPR sehingga memungkinkan acuan-acuan itu hanya berupa surat edaran yang dikeluarkan dimana manajemen pengelolaan perpustakaan sekarang dan kedepan” (La Baba Faisal, SH. M.Pd,Senin 22 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa hal ini berdampak pada standar dan sasaran kebijakan karna pada dasarnya tidak ada peraturan daerah kabupaten sinjai yang khusus dalam pengembangannya yang

tidak memiliki payung hukum yang kuat sehingga tidak memiliki perhatian khusus dalam pengembangannya.

C. Pembahasan

Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). (Sugiyono, 2009:8).

Pada penelitian kualitatif peneliti dituntut untuk menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh sumber data. Pada penelitian kualitatif, peneliti bukan sebagaimana seharusnya apa yang dipikirkan oleh peneliti tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dipikirkan oleh sumber data.

Dengan melakukan penelitian melalui penelitian deskriptif kualitatif, maka peneliti harus memaparkan, menjelaskan, dan menggambarkan data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan. Agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca, maka peneliti akan membahas secara sistematis tentang Peran dan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai dan kendala apa saja yang dihadapi.

1. Peran dan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan

Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai

Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan pengelolaan perpustakaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas perpustakaan. Untuk mengembangkan suatu perpustakaan umum di Kabupaten Sinjai, maka pemerintah dalam hal ini Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan dalam rangka dan upaya melestarikan kekayaan budaya bangsa yang dimiliki.

Adapun mengenai salah satu aspek dari pemerintah daerah terhadap pengembangan dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai yang harus diatur secara hati-hati adalah kurangnya minat membaca dari masyarakat dinilai sangat rendah untuk itu perlu digalakkan kembali jumlah pengunjung keperpustakaan yakni paling banyak rata-rata mencapai sekitar 50 sampai 70 orang itupun dari pelajar dan mahasiswa. Sehingga, penyebab kurangnya minat masyarakat Kabupaten Sinjai dalam hal membaca disebabkan oleh budaya yang memang dari dulu masyarakat kurang minat untuk membaca (kompasiana. Com:Akses, 19 Desember 2014).

Perpustakaan umum dikabupaten sinjai masih terbatasnya sarana dan prasarana yang belum mencerminkan suatu bentuk fasilitas yang ideal sesuai dengan tuntutan pengguna dan sumber daya manusiadikabupaten sinjai dilihat dari segi kualitas perpustakaan umum di kabupaten sinjai. Dimana dari fakta yang terjadi saat ini yaitu tingkat kesadaran dan minat masyarakat untuk mengunjungi dan memanfaatkan perpustakaan umum dikabupaten sinjai padahal pemerintah

daerah telah memberikan bahan bacaan bermutu untuk perpustakaan umum di kabupaten sinjai, akan tetapi dari observasi peneliti terkait bukti-bukti dari pengunjungnya kian mengalami penurunan. Salah satu elemen penting yang terjadi di perpustakaan saat ini adalah kurangnya minat membaca masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan yang ada. Budaya baca adalah Suatu sikap dan tindakan/perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan (Sutarno, 2006:27).

Dalam rangka menentukan indikator sasaran pemerintah kabupaten sinjai dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh dinas perpustakaan dan perpustakaan kabupaten sinjai yakni : tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, meningkatkan jumlah taman bacaan masyarakat, meningkatkan layanan pustakawan terhadap pengunjung perpustakaan, menyimpan, memelihara, dan mendayagunakan arsip sebagai warisan budaya bangsa khususnya budaya melayu dan sebagai bahan pertanggung jawaban nasional. Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang (Dwiyanto Indiahono 2009:38).

Selain daripada meningkatkan minat baca di perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai, pihak pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan. Perpustakaan umum sebagai pelayanan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang aktual, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah di akses dengan kebutuhan dan keinginan pengunjungnya. Menurut analisa peneliti

dalam rangka pengembangan perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai pemerintah daerah juga perlu menciptakan terobosan baru terkait dengan pengembangan layanan internet secara gratis dan terbuka untuk masyarakat umum. Kemudian agar perpustakaan dapat menjalankan fungsinya dan memberikan layanan kepada masyarakat pengguna dengan baik dan berkualitas perlu didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai pula. Sarana komputer untuk pengembangan sistem komputerisasi, karna dengan sarana ini pengelola perpustakaan akan bekerja dengan mudah, cepat, efektif, dan masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang ada diperpustakaan tanpa batas waktu dan tempat kemudian sarana pendukung lainnya seperti penyediaan fasilitas kantor dan tata ruang yang terstruktur.

2. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Terhadap Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai

Dalam rangka pengembangan dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah sebagaimana yang didapat peneliti di lapangan yaitu tidak lain daripda faktor dana dan sumber daya manusia yang masih belum kompeten. Kinerja kebijakan adalah pencilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan diawal (Raharjo Adisasmita 2011:102).

Dalam rangka menentukan indikator sasaran pemerintah kabupaten sinjai dngan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh dinas perpustakaan dan perpustakaan kabupaten sinjai yakni : tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung,

meningkatkan jumlah taman bacaan masyarakat, meningkatkan layanan pustakawan terhadap pengunjung perpustakaan, menyimpan, memelihara, dan mendayagunakan arsip sebagai warisan budaya bangsa khususnya budaya melayu dan sebagai bahan pertanggung jawaban nasional. Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang (Dwiyanto Indiahono 2009:38).

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Efektivitas dalam suatu organisasi secara langsung tergantung pada efektivitas kerja sumber daya manusianya untuk mencapai efektivitas kerja sumber daya manusia yang unggul dapat selalu dikembangkan dengan upaya kualitas sumber daya manusia (Widjaja, 2004:79). Memang tidak dapat dipungkiri kualitas dari sumber daya manusia merupakan faktor utama keberhasilan sebuah perpustakaan, oleh karena itu sumber daya manusia harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah agar Perpustakaan Umum dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan optimal. Oleh karenanya, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan adanya sumber daya manusia yang cukup ditopang dengan keahlian dan kemampuannya, diluar dari sumber daya manusia, sumber daya lain juga perlu diperhitungkan seperti sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karna, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik. Seperti inilah yang

terjadi di kantor perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai sumber daya manusia masih belum bisa memanajemenkan waktu dan menjadi hambatan dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Selain itu juga, keterbatasan sumber dana juga menjadi salah satu faktor penyebab kurang berjalannya suatu kebijakan. Kondisi perpustakaan umum saat ini masih sangat memprihatinkan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor lain diantaranya: rendahnya presentase anggaran yang dialokasikan untuk fasilitas perpustakaan, belum adanya pengelola (pustakawan) yang bertanggung-jawab untuk mengelola perpustakaan secara profesional, lemahnya pemerintah daerah dalam mencari terobosan baru dalam rangka pengembangan perpustakaan.

Selanjutnya kendala yang dihadapi pemerintah terhadap kebijakan pengembangan perpustakaan ini dapat diidentifikasi dengan mempengaruhi peran, kinerja kebijakan, sumber daya manusia yaitu dalam pelaksanaan pengembangan perpustakaan umum di Kabupaten Sinjai ini karna pada dasarnya tugas pokok dan fungsinya masing – masing tidak ada peraturan daerah kabupaten sinjai yang khusus dalam pengembangan perpustakaan sehingga dalam pengembangannya tidak relevan dalam mengambil suatu kebijakan, tidak ada lembaga yang memiliki payung hukum yang kuat yang memiliki perhatian khusus dalam pengembangan perpustakaan di Kabupaten Sinjai.

Menurut analisa peneliti terkait dari masalah yang dihadapi oleh perpustakaan dalam hal ini pihak dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai melihat pengembangan dan kondisi perpustakaan yang masih kurang memadai serta melihat beberapa kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan maka penulis, menyatakan bahwa kurang efektifnya pemerintah daerah dalam pengembangan dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Peran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai” penulis, dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Peran dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan budaya baca di kalangan masyarakat Kabupaten Sinjai
 - b. Upaya meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan
 - c. Upaya peningkatan sarana dan prasarana
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Terhadap Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai” penulis, dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :
 - a. Sumber daya

Dimana sumber daya dapat dilihat dari segi kualitas mengenai riwayat pendidikan dan kemampuan.
 - b. Sumber dana (anggaran)

Dimana anggaran yang kurang memadai sehingga dalam rangka upaya pengembangan perpustakaan ini dapat dilihat dari masih terbatasnya

sarana dan prasarana yang belum mencerminkan suatu fasilitas dari perpustakaan yang ideal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di kemukakan diatas, untuk meningkatkan peran dan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten sinjai dan kendala yang dihadapi.

Adapun saran dari peneliti yaitu :

1. Perlu adanya mekanisme koordinasi atau kerjasama antara berbagai instansi lain dan masyarakat, dengan adanya koordinasi maka akan ada suatu program atau kegiatan dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan.
2. Sumber daya manusia merupakan faktor utama keberhasilan sebuah perpustakaan, maka dari itu sumber daya manusia merupakan prioritas utama di perpustakaan umum bagi pegawai harus diberi secara intensif melalui pembinaan.
3. Harus lebih memaksimalkan lagi anggaran yang ada agar program kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi.
4. Sebagai perpustakaan dalam hal ini sebagai organisasi pelayanan publik dituntut untuk menyediakan pelayanan informasi yang aktual, tepat waktu, cepat, berkelanjutan dan mudah diakses sesuai dengan kebutuhan pemustaka maka diperlukan suatu komitmen disetiap kinerjanya.
5. Perpustakaan berusaha melakukan sosialisasi, publikasi, dan promosi yang terus menerus agar keberadaannya dikenal, di manfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011
- Alim, Sumarno. *Penelitian Kausalitas Komparatif*. Surabaya: Clearning UNESA. 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2011
- Bafadal, Ibrahim. *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta:2005
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Special For Women)*. Jakarta: Sygma. 2005
- Fadillah, Rahman. *Upaya Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Paser dalam Meningkatkan Minat Membaca Masyarakat di Perpustakaan Umum Kabupaten Paser*. Jurusan ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas ummul. 2013
- Ika Maria Dian Saraswati. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Perpustakaan Desa di KPADD kabupaten kayung utara*, jurusan ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial dan politik universitas tanjung pura. 2012
- Lasa, HS. *Manajemen Perpustakaan*. Yoyakarta : Gama Media. 2005
- Moelong. Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2000
- Nusantari Anita. *Strategi Pengembangan Perpustakaan*. Cet, 1 ; Jakarta. Prestasi pustaka. 2012
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta. 2013
- Perpustakaan Nasional, RI. *Pedoman Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. 1992
- Raho, Berner. *Teori Sosiologi Moderen*. Jakarta:prestasi pustaka raya. 2007
- Ruhayaningsih. *Pengelolaan Perpustakaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2007
- Soerjono, Soekanto. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. 2009

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. cet. 21; Bandung: Alfabeta. 2014

-----*Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2009

Sulistyo – Basuki. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1991

Sutarno NS. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor, 2013

-----*Manajemen Perpustakaan Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Sagung Seto. 2006

Raho, berner. *Teori Sosiologi Moderen*. Jakarta: Prestasi Pustaka raya. 2007

Undang Undang No 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang Undang Republik Indonesia No.43 Tahun 2007. *Tentang Perpustakaan*. Jakarta :Tamita Utama. 2009

Widjaja, HAW. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2004

Daftar pertanyaan

(Instrumen wawancara untuk Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sinjai)

1. Program apa saja yang diterapkan pemerintah untuk pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.?
2. Apakah dalam pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai melakukan kerja sama dengan instansi lain atau dengan perpustakaan itu sendiri.?
3. Bagaimana penyediaan infrastruktur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.?
4. Apa ada dana alokasi khusus untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.?
5. Bagaimana penyerapan dana dan hasil yang diperoleh untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.?
6. Apakah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai sudah mampu memenuhi sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan perpustakaan.?
7. Perpustakaan bukan lagi satu-satunya sumber informasi saat ini, jadi bagaimana pemerintah dan pengelola perpustakaan bersinergi untuk mempertahankan eksistensi Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.?
8. Apa ada aturan baku yang diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan.?

9. Apa saran dan harapan bapak dalam masalah yang dihadapi dalam proses pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.?

Daftar Pertanyaan

(instrumen wawancara untuk kepala bagian pengembangan)

1. Bagaimana konsep dasar dalam pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.?
2. Program apa saja yang ditawarkan kepada pemerintah dalam rangka pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.?

Daftar Pertanyaan

(instrumen wawancara untuk kepala bagian pelayanan)

1. Bagaimana sistem layanan yang diterapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.?
2. Apa ada aturan baku yang diterapkan dalam pelayanan perpustakaan.?

Daftar Pertanyaan

(instrumen wawancara untuk kepala bagian kearsipan)

1. Bagaimana sistem pengelolaan arsip yang diterapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.?
2. Dokumen apa saja yang di arsipkan saat ini.?

Daftar Pertanyaan

(instrumen wawancara untuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai)

1. Dalam rangka pengembangan Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai apakah Dinas Pendidikan melakukan kerja sama dengan Dinas Perpustakaan itu sendiri.?

2. Bagaimana bentuk kerja sama yang biasa dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dengan Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sinjai.?

L
A
M
P
I
R
A
N



1 2 0 1 8 1 9 1 4 2 7 4 3 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **7413/S.01/PTSP/2018**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Sinjai

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Adan dan Humaniora UIN Alauddin Makassar Nomor : 1745/A.1.1/TL.01/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **SUARDI JUFRI**
Nomor Pokok : 40400112045
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H.M.Yasin Limpo No. 36, Samata

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SINJAI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Oktober s/d 20 November 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 09 Oktober 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A.M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Adan dan Humaniora UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Persatuan Raya Nomor 116 Telp./Fax. (0482) 22450 Kab. Sinjai 92611

Sinjai, 18 Oktober 2018

Nomor : 3153/21/01/DPM-PTSP/X/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sinjai

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Selatan, Nomor : 7413/S.01/PTSP/2018, Tanggal 09 Oktober 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian. Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : SUARDI JUFRI
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 06 Februari 1995
Nama Lembaga/Perguruan tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
: MAKASSAR
NIM : 40400112045
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Dusun Annie Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan
Kab. Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam rangka Penyusunan Skripsi/Tesis/Disetasi dengan Judul : **PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SINJAI.**

Yang akan di laksanakan dari : Tgl. 10 Oktober s/d 20 November 2018
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai
- Demikian izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI SINJAI
KEPALA DINAS,


ANDI ADEHA SYAMSURI, AP, S.IP, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19750105 199311 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Adam dan Humaniora UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Bersangkutan Sdr/(Suardi Jufri)



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R. A. Kartini No. 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan ☒ 92611 ☎ 0482 – 21145 Fax. 22286

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/04. 8626 /DP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai menerangkan bahwa :

- N a m a : SUARDI JUFRI
- Tempat / tanggal lahir : Makassar, 06 Februari 1995
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Alamat : Dusun Annie Desa Alenangka
Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melaksanakan penelitian dengan judul **“PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SINJAI”** dalam rangka penyelesaian Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan Seperlunya.

Sinjai, 23 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sinjai,



Drs. H. SYAMSUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NTP : 19590808 198602 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. R. A. Kartini No. 1 Kode Pos 92611 Telp. (0482) 21994 Faks. 21994 Sinjai

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 050 /21.426 /DPK/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LA BABA PAISAL,SH.M.Pd**
NIP : 19631020 199303 1 008
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Alamat : Jl. R.A.Kartini No.1

Menerangkan bahwa benar Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : **SUARDI JUFRI**
NIM : 40400112045
Program Studi : Ilmu Perpustakaan

Telah melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/tesis dengan judul “PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SINJAI” pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Sinjai

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sinjai, 23 Oktober 2018

Kepala Dinas Perpustakaan
Dan Kearsipan Kab. Sinjai



LA BABA PAISAL,SH.,M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19631020 199303 1 008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 ☐ (0411) 864924, Fax. 864923 Makassar
Kampus II : Jl. H. Yasin Limpo ☐ (0411) 841879, Fax. 8221400 Samata-Gowa

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : B-046/A.I.1/TL.00/SK/UM/01/2019
TENTANG
PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI
TAHUN 2019

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan tanggal 11 Januari 2019 perihal : Ujian Munaqasyah Skripsi a.n.
SUARDI JUFRI NIM. 40400112045 Jurusan Ilmu Perpustakaan dengan judul skripsi:

PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu membentuk panitia, pembimbing dan penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam penetapan Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai panitia, pembimbing dan penguji.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 293 Tahun 2018 tentang Kalender Akademik Tahun 2018/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia, Pembimbing dan Penguji Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- | | |
|---------------|------------------------------------|
| Ketua | : Dr. Abd. Rahman R, M.Ag. |
| Sekretaris | : Touku Umar, S.Hum., M.I.P. |
| Pembimbing I | : Dr. H. M. Dahlan M, M.Ag. |
| Pembimbing II | : Drs. M. Jayadi, M.Ag. |
| Penguji I | : Irvan Mulyadi, S.Ag., S.S., M.A. |
| Penguji II | : Dra. Hj. Surayah, M.Pd. |
| Pelaksana | : Niswa |

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketiga : Ujian Skripsi / Munaqasyah tersebut akan dilaksanakan pada hari / tanggal : **Jumat, 18 Januari 2019, Jam 14.00 - 15.30 Wita, Ruang LT.**

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Romangpolong
pada tanggal : 11 Januari 2019

Dekan,
Dr. H. Barsihannor, M.Ag.
NIP. 19691012 199603 1 003

DOKUMENTASI



Dinas Perpustakaan dan Kearsipian Kabupaten Sinjai



Wawancara dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipian Kabupaten Sinjai



Proses Wawancara dengan pustakawan bagian pengembangan



Proses wawancara dengan pustakawan bagian pelayanan



wawancara dengan bidang pengelolaan arsip aris



Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai



Daftar koleksi bahan pustaka di Rak



Daftar koleksi bahan pustaka



Daftar buku pelajaran di Rak



Daftar koleksi bahan pustaka di Rak



Datar koleksi bahan pustaka di Rak



Suasana Pengunjung pada siang hari

Suasana Pengunjung pada malam hari



Suasana pengunjung pada malam hari



Kartu anggota perpustakaan



Benda yang di arsipkan



Tahap renovasi gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai



RIWAYAT HIDUP PENULIS

SUARDI JUFRI penulis kelahiran Makassar, pada tanggal 05 Februari 1995, Anak keempat dari tujuh bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan Ayahanda Jufri dan Ibunda Kati. Putra keempat yang akrab di panggil Ardhy telah melalui beberapa jenjang pendidikan. Penulis menempuh pendidikan formal pertama pada tahun 2000 di SD Negeri 115 Annie, Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang merupakan daerah penulis dibesarkan, di sekolah tersebut menimba ilmu selama enam tahun dan selesai pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMP NEGERI 1 Bikeru dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 Sinjai Selatan dan selesai pada tahun 2012 yang sekarang berpindah nama menjadi SMA NEGERI 2 Sinjai. Penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di kota Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur SBMPTN.

Selama masa perkuliahan, aktif pada Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam komisariat Dakwah dan Komunikasi periode 2012-2014, Organisasi Daerah Kerukunan Keluarga Mahasiswa Sinjai (KKMS) Komisariat UIN Alauddin Makassar periode 2014-2015, Lingkar Mahasiswa Sulawesi Selatan (LIMA SUL-SEL) Periode 2015-2017, dan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sinjai periode 2017-2018.

Berkat Rahmat Allah SWT dan kerja keras penulis dapat menyelesaikan study di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2019 dengan tersusunnya skripsi yang berjudul *Peran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai*.